

SEJARAH KECAMATAN KATOBU KABUPATEN MUNA (1960-2014)¹

Oleh

Yandi Arifin²

La Ode Baenawi³

Hayari⁴

ABSTRAK

Fokus penelitian ini mengacu pada tiga permasalahan utama yaitu (1) Apa yang melatarbelakangi terbentuknya Kecamatan Katobu Kabupaten Muna? (2) Bagaimana perkembangan Kecamatan Katobu Kabupaten Muna? (3) Faktor-faktor apa yang mendukung perkembangan Kecamatan Katobu Kabupaten Muna?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah menurut Helius Sjamsuddin, yang menempuh tiga tahapan yaitu : (1) Heuristik, yakni pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, (2) Verifikasi, yakni penilaian terhadap keautentikan dan keabsahan data, dan (3) Historiografi, yakni mencakup penafsiran (interpretasi), penjelasan (eksplanasi), dan penyajian (ekspose). Sedangkan kajian pustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep sejarah, konsep pembangunan daerah, konsep kecamatan, konsep pemerintahan daerah serta konsep otonomi daerah.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa: (1) Latar belakang terbentuknya Kecamatan Katobu Kabupaten Muna yaitu merupakan salah satu pelengkap dari syarat pembentukan Kabupaten Muna. Hal ini diketahui bahwa ketika proses pembentukan Kabupaten Muna, *Distrik* Katobu disertakan sebagai salah satu dari empat kecamatan yang mendukung dari syarat administrasi terbentuknya Kabupaten Muna. (2) Perkembangan Kecamatan Katobu Kabupaten Muna dari tahun 1960-2014 yaitu terlaksana dari sektor pertanian dan perkebunan, kelautan dan perikanan, pendidikan, kesehatan, pemerintahan kecamatan dan lingkup desa/kelurahan serta sosial budaya. Hal ini menunjukkan dengan meningkatnya sektor-sektor tersebut dari tahun ke tahun yang dilihat dari pemerintahan masing-masing Camat Katobu sejak terbentuknya (1960) sampai dengan masa pemerintahan sekarang (2014). (3) Faktor-faktor yang mendukung perkembangan Kecamatan Katobu Kabupaten Muna yaitu (a) faktor wilayah, yang terdiri dari sub faktor perekonomian dan daerah sentral/pusat kota kabupaten. (b) Faktor pemerintahan dalam hal ini peningkatan kualitas dan kuantitas kerja aparat pemerintah kecamatan hingga para kepala desa dan kelurahan. (c) Faktor sosial budaya ditandai dengan terlaksananya hubungan antar sesama masyarakat serta hubungan masyarakat dengan pemerintah Kecamatan Katobu dalam mendukung pembangunan pemerintah baik pemerintah Kecamatan Katobu maupun pemerintah Kabupaten Muna.

Kata Kunci: *Sejarah, Perkembangan, Kecamatan Katobu*

PENDAHULUAN

Pembangunan bangsa Indonesia yang telah berlangsung merupakan bagian dari proses pembangunan yang telah direncanakan secara bertahap dan berkesinambungan.

¹Disadur dari hasil penelitian 2016

²Alumni Pendidikan sejarah, wisuda periode April 2016

³Dosen FKIP UHO

⁴Dosen FKIP UHO

Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengembangkan amanah dalam mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 1945, yakni untuk mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk sejak tahun 1945, dan sejak itu pulalah digalakan pembangunan kehidupan manusia secara bertahap melalui Repelita.Orde Baru yang melaksanakan pembangunan nasional secara multi dimensional dengan sasaran mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara material dan spiritual. Karena itu pembangunan di Indonesia mengacu pada hakekat pembangunan nasional yakni pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Dewasa ini pemerintah dan bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan yang direncanakan, yang mengarah kepada pembangunan suatu masyarakat moderen yang terbuka.Pembangunan itu telah dilaksanakan berdasarkan atas perencanaan dengan menggunakan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi. Perencanaan yang mendasari usaha pembangunan itu adalah integral, yang memperhatikan segala aspek kehidupan masyarakat, aspek ekonomi, kesejahteraan material dan spiritual, intelektual dan emosional, aspek politik, ekonomi, dan keamanan dalam bidang luar dan dalam negeri nasional (Harsono, 1984: 246).

Pembangunan pada sektor pemerintahan merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan suatu pemerintahan yang baik dan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.Dalam perkembangan pembangunan kecamatan dapat meningkatkan pembangunan baik sarana maupun prasarana yang ada dalam lingkup pemerintahannya sehingga dapat memberi pengaruh terhadap perkembangan sektor-sektor lainnya.

Sebagai landasan dalam pembangunan pemerintahan wilayah Indonesia UUD 1945 pasal 18 yang berbunyi “pembagian daerah wilayah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan menurut undang-undang dengan dasar memandang dan mengingat permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul daerah yang bersifat istimewa”. Undang-undang ini ditetapkan mengakui adanya kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum.Adat istiadat yang masih sepanjang masa menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional.

Sejalan dengan gerak dan laju pembangunan yang menyeluruh meliputi segala bidang yang sedang digalakkan pemerintah pemerintah bersama seluruh rakyatnya. Peran sejarah amat penting sebagai sumber pengetahuan dan sebagai pedoman untuk berkarya serta menciptakan hari depan sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai Pancasila yang telah disesuaikan bersama. Berpedoman pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah berdasarkan asas desentralisasi.

Wujud nyata dari pelaksanaan pembangunan nasional dilaksanakan secara menyeluruh dan merata, maka pemerintahan mengeluarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Pelaksanaan pembangunan di daerah merupakan suatu hal yang paling penting dalam rangka pembangunan sistem pemerintahan dan aspek-aspek pemerintah.Hal ini dilakukan guna mengingat berbagai pertimbangan baik pertimbangan politik,ekonomi, sosial, budaya, psikologis maupun sejarah daerah.

Proses pembentukan Kecamatan Katobu, tidak terlepas dari upaya pengembangan wilayah, administrasi pemerintah, ekonomi, sosial, budaya yang teratur,

sebagaimana halnya pembentukan kecamatan-kaecamatan lainnya yang ada di Sulawesi Tenggara pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Pembentukan suatu kecamatan dilakukan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pedoman umum pengaturan mengenai pembentukan kecamatan.

Munapada awalnya dikenal dengan nama *Wuna*, yang dalam Bahasa Muna berarti bunga. Nama itu memberi makna spiritual kepada kejadian alamnya, dimana terdapat gugusan batu yang berbunga. Gugusan batu tersebut menyerupai batu karang. Pada waktu-waktu tertentu batu karang dimaksud kerap mengeluarkan tunas-tunas yang tumbuh seperti bunga karang. Oleh karena kejadian itulah maka masyarakat Muna menyebutnya sebagai *Kontu Kowuna* artinya Batu Berbunga. Gugusan batu berbunga tersebut terletak di dekat Masjid Tua Wuna di Kota Muna yang bernama *bahutara* (bahtera).

Dengan berkembangnya Kabupaten Muna tidak terlepas dari perjalanan sejarah Kabupaten Muna, selain itu juga perjuangan untuk membentuk Kabupaten Muna ini juga tidak terlepas dari adanya faktor-faktor yang mendorong terbentuknya Kabupaten Muna ini.

Di Indonesia, sebuah kecamatan adalah bagian dari Kabupaten atau kota. Sebuah Kecamatan itu sendiri terdiri dari beberapa kelurahan dan desa administratif. Dalam hal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dibawah pimpinan camat.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk menulis dan meneliti masalah tersebut dengan judul “Sejarah Kecamatan Katobu Kabupaten Muna (1960-2014)”.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang dikemukakan oleh Samsuddin (2012: 67) yang terbagi dalam tiga tahapan yaitu:

Pertama, Pengumpulan Sumber (Heuristik). Teknik pengumpulan data penelitian pada saat pengumpulan sumber adalah *pertama*, Penelitian kepustakaan. *Kedua*, Penelitian lapangan, yaitu peneliti mengadakan penelitian langsung di lapangan dengan menggunakan teknik Pengamatan (observasi), Wawancara, dan Studi dokumen.

Kedua, Kritik Sumber. Tahap selanjutnya melakukan kritik sumber dengan dua cara kritik yaitu Kritik ekstern dan Kritik intern.

Ketiga, Historiografi. Tahap ketiga adalah melakukan historiografi yaitu tahap yang dilakukan dengan melakukan penafsiran (Interpretasi), Penjelasan (Eksplanasi), dan Penyajian (Ekspose).

HASIL PENELITIAN

Latar Belakang Terbentuknya Kecamatan Katobu Kabupaten Muna

Berbicara masalah latar belakang terbentuknya suatu daerah, tentunya tidak lepas yang nama proses. Sebab tidak adanya kejadian yang langsung terjadi begitu saja tanpa adanya sebuah perjalanan panjang yang menitihkan langkah demi langkah sebagai

bentuk sejarah. Tentunya tahapan-tahapan hingga menggapai dari proses itu dapat dicapai.

Berdasarkan akan hal tersebut, tentunya Kecamatan Katobu, tidak berdiri atau tidak terbentuk dengan begitu saja tanpa adanya sebuah proses yang mengharuskan terjadinya atau terbentuknya Kecamatan Katobu hingga sampai sekarang. Tentunya dinamika-dinamika perjalanan panjang Kecamatan Katobu akan teruarai dengan panjang sebagai dari usaha pengungkapan sejarah, sebagai ilmu yang berdiri diatas kebenaran. Oleh sebab itu dalam mengeksplanasi latar belakang terbentuknya Kecamatan Katobu, tentunya akan diuraikan sekilas tentang bagaimana keadaan Katobu sebelum terbentuknya menjadi sebuah kecamatan, atau keadaan pra Kecamatan Katobu. Disamping itu sejarah Kecamatan Katobu ini, berbeda dengan Kecamatan lain yang berada di wilayah Kabupaten Muna.

Perkembangan Kecamatan Katobu

Sebagaimana biasanya, masyarakat yang berada di pusat Kota Raha ini merupakan masyarakat yang tidak jauh berbeda dengan masyarakat yang berada di Indonesia umumnya dan khususnya Sulawesi Tenggara. Aktivitas kesehariannya dilakukan secara rutinitas tanpa adanya beban moral yang tertanam dalam jiwa masyarakat Katobu.

Keberadaan Katobu sebelum menjadi kecamatan, sebenarnya sudah ada sejak sebelum terbentuknya Kabupaten Muna. Akan tetapi status dari Katobu tersebut merupakan *distrik* sebagai pemberian nama oleh Belanda ketika masih berkuasa di Indonesia. Mengapa Katobu dijadikan sebagai *distrik*, karena perkembangan yang terjadi sewaktu itu sudah mulai pesat dari perkampungan biasanya terutama dalam konteks penduduk. Penduduk yang berada di wilayah tersebut sangat berbeda jauh dengan yang terdapat di daerah-daerah lainnya di kepulauan Muna. Sehingga Belanda sewaktu berkuasa di Indonesia dan menduduki kepulauan Muna, Katobu menjadi wilayah yang diperhitungkan dikarenakan letak geografisnya yang sangat strategis terhadap pertahanan dan keamanan tentara Belanda.

Sebagai perkampungan yang kini mulai ramai diwaktu itu, menjadikan wilayah tersebut tidak lepas dari datangnya atau menjadi arus lintasan pelayaran dan perdagangan. Tentunya dengan melihat kondisi seperti itu tentara Belanda tidak menyangka wilayah tersebut sebagai wilayah yang kemudian berada dipangkuan kekuasaan Belanda. Sebagai bukti bahwa Katobu merupakan wilayah yang strategis sebagaimana yang dimaksud, yaitu kondisi geografis dan bentang alam yang begitu kaya akan sumber daya alam, baik pertanian maupun perairan laut. Olehnya itu maka akses atau transportasi untuk menghubungkan antara penduduk satu dengan penduduk lainnya yang berada diluar wilayah Katobu segera dilakukan. Sebagaimana ciri dari penduduk kepulauan tentunya akses transportasi sebagai akses penghubung tentunya hal itu sudah jelas dilakukan, serta untuk mendukung dari sarana tersebut, maka pelabuhan sebagai tempat bersandarnya kapal-kapal didirikan oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh La Ode Taribu (wawancara 05 September 2015), yang mengemukakan bahwa salah satu faktor yang menjadikan kampung Katobu dahulunya ramai, karena fasilitas transportasi laut yang telah disediakan oleh masyarakat sebagai akses penghubung, serta tersedianya pelabuhan kapal sebagai tempat bersandarnya kapal-kapal nelayan bagi orang-orang Katobu juga orang-orang diluar wilayah Katobu. Disamping itu juga, karena wilayah Katobu sebagai jalur lalu lalang para pelayar guna melakukan perdagangan, maka Katobu dijadikan sebagai wilayah tempat melakukan perdagangan oleh orang-orang yang datang dari luar Pulau Muna.

Sehubungan dengan penjelasan tersebut, maka banyak khalayak yang mengatakan bahwa Katobu merupakan kampung yang tertua juga pesat terhadap aspek perekonomian dan kependudukan. Mengapa demikian, karena faktor sosial ekonomi yang ditunjukkan oleh masyarakat Katobu kepada masyarakat lain diluar wilayah Katobu begitu ramah dan juga baik. Sehingga para orang lain turut melakukan pelayaran untuk menuju ke daerah ini. Oleh sebab itu tidak heran pada saat Kabupaten Muna terbentuk maka wilayah Katobu menjadi objek dari Ibu Kota Kabupaten, karena dilihat dari aspek geografis, demografis serta masa lalu sejarahnya yang banyak menaruh perhatian terhadap proses pembentukan Kabupaten Muna.

Berdasarkan penuturan oleh La Ode Diale (wawancara 10 September 2015), mengatakan bahwa pada saat sebelum Kabupaten Muna terbentuk pada tahun 1945 Katobu masih berstatus nama *Distrik*, yang dikepalai oleh La Ode Owo. Katobu tidak lepas dari upaya Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia selepas dari kependudukan Jepang. Olehnya itu nampaknya politik dari peristwia penunjukan kepala *distrik*.

Dari pendapat diatas, maka pada tahun 1945 yang merupakan tahun dimana Indonesia merdeka lepas dari tangan penjajah, merupakan tidak mengurungkan niat pihak bangsa Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia. Padahal proklamasi kemerdekaan yang baru saja di kumandangkan oleh Ir. Soekarno seakan tidak menjadi hiarau oleh bangsa Belanda. Sehingga upaya Nampak yang dilakukan oleh Belanda dalam menduduki kembali tanah air, yaitu dengan melancarkan agresi militernya sebagai pertanda tidak mengakui atas pengakuan kedaulatan Republik Indonesia.

Seiring dengan perkembangan politik Belanda di Muna, saat pemerintahan kerajaan berubah dari *Fato Ghoerano* menjadi 4 (empat) *distrik* yaitu: Distrik Tongkuno, Distrik Kabawo, Distrik Katobu, Dan Distrik Lawa.

Kemudian Berdasarkan UU Nomor 13 tahun 1964 tentang pembentukan Propinsi Daerah TK I Sulawesi Tenggara yang didalamnya memuat pembentukan Kabupaten Munadengan Ibu Kotanya Raha, maka dengan itu pula Kecamatan Katobu resmi terbentuk sebagai daerah kecamatan yang otonom.

Pada saat terbentuknya Kabupaten Daerah TK II, Muna hanya terdiri atas 7 (tujuh) kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Katobu,
2. Kecamatan Lawa,
3. Kecamatan Tongkuno,
4. Kecamatan Kabawo,
5. Kecamatan Tiworo,
6. Kecamatan Wakorumba, dan
7. Kecamatan Kulisusu

Tidak terhenti sampai disitu, ketika Belanda telah benar-benar mengakui kedaulatan Indonesia dan pergi dari tanah air, wilayah Katobu masih berstatus nama *distrik* sebagai buah peninggalan politik Belanda.

Diketahui bahwa wilayah Katobu atau kampung Katobu sudah ada sejak sebelum terbentuknya Kabupaten Muna, sebagaimana yang dikemukakan oleh La Ode Mukadas (wawancara 11 September 2015), mengatakan bahwa pada awal pengusulan Kabupaten Muna sebelumnya terdiri dari empat *Ghoerah* (*Distrik*) yaitu Distrik Katobu, Distrik Lawa, Distrik Kabawo, dan Distrik Tongkuno. Dari empat *distrik* itu belum memenuhi kriteria untuk membentuk suatu kabupaten, maka diadakan pendekatan dengan beberapa tokoh masyarakat pada saat itu yaitu tokoh masyarakat Kulisusu, tokoh masyarakat

Wakorumba, dan tokoh masyarakat Tiworo Kepulauan, yang pada saat itu ketiga distrik tersebut adalah distrik Kulisusu diwakili oleh La Ode Ganiru dan La Ago, Distrik Wakorumba diwakili oleh La ode Hami dan La Ode Haju, Distrik Tiworo diwakili oleh La Baranti. Berdasarkan kesepakatan yang utuh dan bulat dari tokoh-tokoh tersebut untuk bergabung dalam pemerintahan Kabupaten Muna, maka doktrin untuk terbentuknya Kabupaten Muna sudah tidak ada masalah lagi.

Terbentuknya Kecamatan Katobu, tidak lepas daripada terbentuknya Kabupaten Muna sebagai daerah yang otonom, maka tentu berbagai proses turut dilalui serta dilakukan tokoh-tokoh dari Katobu dalam mendukung terbentuknya Kabupaten Muna. Hal ini tampak pada pertemuan La Ode M. Salihi sebagai kepala *Distrik* Katobu dalam menghadiri rapat yang dilakukan oleh La ode Pandu sebagai ketua adat Muna yang turut dihadiri juga oleh tiga kepala *Distrik* yaitu, Kepala *Distrik* Kabawo, Kepala *Distrik* Tongkuno, dan Kepala *Distrik* Lawa. Selain itu turut pula hadir para kepala kampung, ketua-ketua partai/organisasi, pemuka masyarakat, dan pihak Kepolisian. Rapat tersebut dilakukan pada hari Senin, tanggal 12 September 1955 dengan agenda rapat yakni mendengarkan delegasi DPRD-GR Sultra pada bulan Januari 1955, membicarakan tentang status daerah-daerah otonom dan status swapraja. Rapat memutuskan antara lain, Muna diperjuangkan untuk menjadi daerah Swatantra dengan otonomi penuh. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka hasil rapat memutuskan memberikan mandat kepada La Ode Rasjid dan La Ode Ado untuk melaksanakan tugas menyusun program dan menetapkan langkah perjuangan untuk terbentuknya daerah Swatantra Muna, dan membentuk daerah persiapan pembentukan Kabupaten Muna (La Ode Mukadas, wawancara 11 September 2015) Setelah melewati perjuangan demi perjuangan dalam memekarkan Kabupaten Muna yang didalamnya ikut serta para tokoh-tokoh *Distrik* Katobu. Sejalan dengan itu pada tanggal 2 Maret 1960 secara administratif dan yuridis maka terbentuklah Kabupaten Muna berdasarkan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II di Sulawesi, termasuk didalamnya Kabupaten Muna dengan ibukotanya Raha.

Faktor-faktor yang Mendukung Perkembangan Kecamatan Katobu

Secara spesifik sebetulnya faktor yang mempengaruhi perkembangan kecamatan ini, selain posisinya sebagai ibu kota kabupaten juga tidak terlepas dari posisinya sebagai kota transit yang menghubungkan Kendari dan Baubau. Dengan demikian secara umum faktor yang mempengaruhi selain posisinya tersebut adalah faktor penduduk dengan segala keanekaragamannya dan faktor wilayah.

1. Faktor Penduduk

Sebagaimana pula yang terjadi di wilayah Katobu yang telah dikemukakan di awal pembahasan, bahwa keberlangsungan kehidupan di wilayah tersebut sudah ada sejak dari dulu. Pertumbuhan yang terus meningkat terjadi di wilayah ini, sehingga menjadi wilayah yang berbeda dari wilayah sezamannya yang berada di Kepulauan Muna. Lasimnya bahwa di Katobu merupakan wilayah yang sangat ramai dikunjungi oleh orang-orang yang datang dari luar wilayah Katobu dan luar kepulauan Muna, dan dengan cocoknya kehidupan disana lalu sebahagian orang yang datang di wilayah ini, tinggal secara menetap dengan diikuti oleh para keluarganya. Sehingga dengan penduduk yang sangat pesat itu, tidak mengeherankan bagi para pengagas terbentuknya Kabupaten Muna, Katobu dijadikan pusat sentral kota dengan memilih daerah Raha sebagai ibu kota Kabupaten Muna.

Selain itu, ketika dalam proses pembentukan Kabupaten Muna, tokoh dari kalangan penduduk *Distrik* Katobu ikut serta dan berperan aktif dalam mendukung terwujudnya cita-cita masyarakat Muna kala itu. Sehingga atas dasar itu maka *Distrik* katobu tidak lepas dari pemikiran tokoh-tokoh penggagas untuk kemudian dimekarkan menjadi Kecamatan sekaligus penempatan sentral kota kabupaten. Singkatnya bahwa sumber daya manusia yang berkualitas dan handal sangat diperlukan terutama bagi kalangan muda sebagai penerus cita-cita bangsa secara berkelanjutan yang senantiasa melakukan pembangunan disegala bidang kehidupan masyarakat Kecamatan Katobu pada khususnya serta Kabupaten Muna pada umumnya.

2. Faktor Wilayah

Disamping itu dari segi kondisi geografis, wilayah Katobu merupakan daerah yang sangat strategis dalam melangsungkan pemerintahan. Apalagi dengan hubungan antara pemerintah Kecamatan dengan pemerintah Kabupaten begitu sangat strategis, karena berada dalam jantung kota pemerintahan Kabupaten Muna. Terkhusus lagi dengan adanya transportasi laut dan darat sebagaimana yang telah dijelaskan di awal pembahasan, bahwa wilayah Katobu sebelum terbentuk mejadi kecamatan, di daerah tersebut telah dilakukan pembangunan pelabuhan dalam mendukung akses aktivitas masyarakat, yang kemudian dijadikan pula sebagai pelabuhan persinggahan bagi para pedagang dari luar daerah Katobu. Disamping itu dengan luas wilayah 12.88 Km² sangat mendukung pembentukan Kecamatan serta sentral kota Kabupaten Muna yang turut mendukung pula atas pembangunan kabupaten. Disamping itu bentang alam yang strategis terhadap lahan pertanian dan perkebunan dan subur akan tanaman, disamping itu juga dengan kekayaan perairan laut yang menjadi komoditi sumber daya alam yang memadai sebagai faktor pendukung terbentuknya pemerintahan yang otonom dalam hal ini kecamatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa:

Latar belakang terbentuknya Kecamatan Katobu Kabupaten Muna yaitu merupakan salah satu pelengkap dari syarat pembentukan Kabupaten Muna. Hal ini diketahui bahwa ketika proses pembentukan Kabupaten Muna, *Distrik* Katobu disertakan sebagai salah satu dari empat kecamatan yang mendukung dari syarat administrasi terbentuknya Kabupaten Muna.

Perkembangan Kecamatan Katobu Kabupaten Muna dari tahun 1960-2014 yaitu terlaksana dari sektor pertanian dan perkebunan, kelautan dan perikanan, pendidikan, kesehatan, pemerintahan kecamatan dan lingkup desa/kelurahan serta sosial budaya. Hal ini menunjukkan dengan meningkatnya sektor-sektor tersebut dari tahun ke tahun yang dilihat dari pemerintahan masing-masing camat Katobu sejak terbentuknya (1960) sampai dengan masa pemerintahan sekarang (2014).

Faktor-faktor yang mendukung perkembangan Kecamatan Katobu Kabupaten Muna yaitu (a) Faktor wilayah, yang terdiri dari sub faktor perekonomian dan daerah sentral/pusat kota kabupaten. (b) Faktor pemerintahan dalam hal ini peningkatan kualitas dan kuantitas kerja aparat pemerintah kecamatan hingga para kepala desa dan kelurahan. (c) Faktor sosial budaya ditandai dengan terlaksananya hubungan antar sesama masyarakat serta hubungan masyarakat dengan pemerintah kecamatan dalam

mendukung pembangunan pemerintah baik pemerintah kecamatan maupun pemerintah daerah Kabupaten Muna.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 2002. *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ali, Yakub. 1998. *Perubahan Nilai Upacara Tradisional pada Masyarakat Pendukungnya di Daerah Nusa Tenggara Barat*. Mataram: Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Nusa Tenggara Barat.
- Anonim, 1964. *Undang-Undang Nomor 13 Tentang Pembentukan Provinsi Daerah TK I Sulawesi Tenggara*.
- _____. 1999. *Undang-Undang Nomor 22 Tentang Pengantar Desa dan Kelurahan*. Bandung: Cipta Umbaran
- _____. 2004. *Undang-Undang Nomor 32 Tentang Hak dan Kewajiban Daerah Otonom*.
- _____. 2008. *PP. Tentang Asas Desentralisasi*. Peraturan Perundangan.
- Arif, Muhamad. 2011. *Pengantar Kajian Sejarah*. Bandung: Yrama Widya.
- Bukre, Peter. 2011. *Sejarah dan Teori Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Beratha, I Nyoman. 1991. *Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Busroh, Abu Daud. 1990. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Effendi, Sofian dkk. 1992. *Membangun Martabat Manusia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Harsono, 1984. *Pengantar Antropologi*. Bandung: Bina Cipta.
- Herianto, La Ode, 2009. *Sejarah Terbentuknya Kecamatan Watuputih*. Skripsi Kendari: FKIP Unhalu.
- Hugiono dan Poerwantagra. 1992. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kamaluddin, Rustian. 1991. *Beberapa Aspek pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Kuncoro, Mudjarad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Kuntowijoyo. 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya.
- _____, 2003, *Pokok-Pokok Kuliah Teori Pemerintahan Daerah*, Jakarta, Program Pasca Sarjana MIP.
- Masinambow. 1997. *Koentjanigrat dan Antropologi di Indonesia*. Jakarta: Asosiasi Antropologi Indonesia.
- Miswar. 2008. *Perkembangan Struktur Pemerintahan Kabupaten Sumedang*. Skripsi Universitas Sumatra Utara.
- Nasution, 1998. *Komunikasi Pengenalan Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sarapin. 1968. *Tata Pemerintah dan Administrasi Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sjamsuddin, Helius. 2012. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Sarundajang. 1997. *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- _____. 1999. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Soejito, Irawan. 1983. *Teknik Membuat Peraturan Daerah*. Jakarta: Bina Aksara.

- Soekanto, Soerjono. 1986. *Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian*. Jakarta: Rajawali.
- _____. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soewito, MD. 2007. *Desa dan Kelurahan*. Bandung: Nuansa Aulia Sumber.
- Sudirjo, Daeng. 1980. *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*. Bandung: Aksara.
- Syahdu, Alam. 2010. *Sejarah Perkembangan Kecamatan Kulisusu (1964-2009)*. Skripsi Kendari: FKIP Unhalu.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. *Pengantar Administrasi Pembagunan*. Jakarta: LP3ES.
- Wasiun, 2003. *Sejarah Terbentuknya Kecamatan Bonegunu Sebagai Pemekaran Dari Kecamatan Kulisusu (1968-2002)*. Skripsi Kendari: FKIP Unhalu.
- Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tantang Pemerintahan Daerah)*. Jakarta: Raja Grafindo. Persada.